

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN TAMAN
WISATA ALAM SECARA MELAWAN HUKUM
BERDASARKAN HUKUM KEHUTANAN
(STUDI KASUS TAMAN WISATA ALAM MEGA MENDUNG DI
KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT)**



**Dosen Pembimbing :
Dr. Yuslim, S.H., M.H.
Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

ABSTRAK

Taman Wisata Alam (TWA) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi flora, fauna dan ekosistemnya serta gejala dan keunikan alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Sejauh ini pemanfaatan TWA di Sumatera Barat yang dikelola oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya dilakukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi kaidah konservasi. Hal ini mengakibatkan terganggunya fungsi pokok kawasan yakni sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu pemanfaatan TWA secara melawan hukum adalah TWA Mega Mendung di Jorong Aia Mancue, Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Pembangunan sarana dan prasarana di TWA Mega Mendung saat ini dengan cara menebang pohon dan merambah kawasan hutan, berada disepanjang aliran sungai Batang Anai yang mengalir di dalam kawasan. Maka dari itu dalam tesis ini penulis ingin mengangkat permasalahan yaitu apa saja jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap TWA, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di TWA, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sumatera Barat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di TWA. Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu pembahasan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola namun tetap didasari oleh Undang-undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, jenis – jenis dari pelanggaran terhadap pemanfaatan TWA Mega Mendung berupa, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 (seratus) meter dari tepi kanan dan kiri sungai. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum adalah dengan upaya penegakan hukum pre-emptif, preventif dan represif dan kendala yang dihadapi berupa hambatan structural dan hambatan dari masyarakat. Penulis sangat menyarankan kepada aparaturnya untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi sehingga tujuan utama dari penerapan sanksi pidana tersebut bisa terlaksana, yakni memberikan efek jera bagi sipelaku.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Taman Wisata Alam, Melawan Hukum

ABSTRACT

Nature Tourism Park (NTP) is one of nature conservation areas that have potential flora, fauna and its ecosystem as well as natural phenomena and uniqueness that can be developed as objects and natural tourist attraction. So far, the utilization of NTP in West Sumatra managed by the community and other parties is done unlawfully and does not meet the rules of conservation. This has resulted in disruption of the main function of the area as a protected area of life buffer system, preservation of diversity of plant and animal species, and sustainable utilization of biological natural resources and its ecosystem. One of the unlawful use of NTP is NTP Mega Mendung in Jorong Aia Mancue, Nagari Singgalang, Sepuluh Koto Subdistrict, Tanah Datar District, West Sumatra Province. The development of facilities and infrastructure in NTP Mega Mendung today by cutting trees and penetrating the forest area, located along the river flow Batang Anai that flows in the area. Therefore in this thesis the author wants to raise the issue of what kinds of violations committed by the community to NTP, what efforts have been done by BKSDA West Sumatra in law enforcement of violations that occurred in NTP, and the constraints faced By BKSDA West Sumatra in the effort to enforce the law against violations that occurred in NTP. To answer the above question the author uses the empirical juridical method of discussion by identifying and conceiving the law as a real and functional social institution in life that is patterned but still based on Law No. 41 of 1999 on Forestry, and analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of the research, the types of violations against the utilization of NTP Mega Mendung are, undertake activities that cause forest destruction, work and/or illegally use and/or occupy the area, encroach on forest areas with radius or distances up to 100 (one hundred) meters from the right and left bank of the river. Efforts made in law enforcement are with pre-emptive, preventive and repressive law enforcement efforts and constraints encountered in the form of structural barriers and obstacles from the community. The authors strongly advise the apparatus to be more assertive in applying sanctions so that the main purpose of the implementation of criminal sanctions can be done, namely to provide a deterrent effect for my custodian.

Keywords: Utilization, Nature Parks, Against the Law.